



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALAKA
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan bimbinganNya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Tahun 2023 dapat diselesaikan. LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun. Sebagai tindak lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang berisi informasi tentang pencapaian program yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan.

Betun, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Malaka



dr. Sri Charo Ulina

Pembina Tk.1

NIP.19780611 200904 2 004

DAFTAR ISI

Judul..... i

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 Latar Belakang 1

 Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi..... 2

 Aspek strategis dan indikator kineja 4

 Isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 Visi 12

 Misi 12

 Tujuan 21

 Sasaran 21

 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja 2023..... 26

 Program..... 31

 Perjanjian Kinerja..... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 32

 Analisa Capaian Kinerja..... 36

BAB VI PENUTUP..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 2 SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	30
Tabel 3 Capaian sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 4 Capaian SPM Bidang Kesehatan 2023	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam mewujudkan dan terselenggaranya *Good Governance* pemerintah dituntut melakukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban pelaksanaan tugas yang tepat, jelas terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah suatu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya demi terwujudnya penerapan anggaran yang berbasis kinerja.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sangat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan tugas Pemerintah yang baik, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur Kinerja Instansi Pemerintah secara transparan, sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memberikan masukan bagi pihak - pihak yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Instansi Pemerintah yang bersih dan transparansi di bidang Pelayanan Kesehatan .

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sebagai salah satu unit teknis dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 tentang perencanaan strategik, rencana kinerja dan pengukuran terhadap pelaksanaan kinerja, sehingga dapat diketahui sampai seberapa jauh kualitas dan capaian kinerja serta capaian sasaran kinerja aparatur dalam Tahun Anggaran 2022.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malaka melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai kewenangan daerah di bidang kesehatan yang meliputi kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Dasar, Sumber Daya Kesehatan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, yang meliputi Pelayanan Kesehatan Dasar, Sumber Daya Kesehatan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Sumber Daya Kesehatan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kesehatan Kabupaten Malaka.

a. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati malaka dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya manusia.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya kesehatan
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Melaksanakan administrasi kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
4. Melaksanakan administrasi dinas kesehatan
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas meliputi:
 - a. Sub bagian hukum, kepegawaian dan umum

- b. Sub bagian program informasi dan humas
- c. Sub bagian keuangan dan pengelolaan aset
- 3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan 3 (Tiga) seksi;
 - a. Seksi kesehatan keluarga gizi
 - b. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat dan,
 - c. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 4. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit membawahkan 3 (Tiga) seksi;
 - a. Seksi surveilens dan imunisasi
 - b. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - c. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 5. Bidang pelayanan kesehatan membawahkan 3 (Tiga) seksi;
 - a. Seksi pelayanan kesehatan primer
 - b. Seksi pelayanan kesehatan rujukan
 - c. Seksi pelayanan kesehatan tradisional
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan 3 (Tiga) seksi;
 - a. Seksi kefarmasian
 - b. Seksi alat kesehatan dan PKRT
 - c. Seksi sumber daya manusia kesehatan
- 7. UPT, dan
- 8. Kelompok jabatan fungsional

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. Aspek Strategis

Aspek strategis seperti halnya pada kebijakan umum untuk meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan kepada masyarakat mencakup:

- a. Upaya Kesehatan
 - 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2. Peningkatan status Gizi Balita
 - 3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
 - 5. Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan
 - 6. Pengawasan penyehatan makanan dan minuman
 - 7. Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi
 - 8. Peningkatan pengetahuan ibu
 - 9. Peningkatan pengetahuan remaja dan ibu
 - 10. Peningkatan akses dan pelayanan KB
- b. Pembiayaan Kesehatan
 - 1. Peningkatan program-program pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin dan hampir miskin yang tidak mampu membiayai pengobatan.
 - 2. Peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan)
 - 3. Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan
- c. Sumber Daya Manusia
 - 1. Pemerataan penyebaran tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan
 - 2. Peningkatan jumlah dan jenis tenaga Kesehatan
 - 3. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan
 - 4. Peningkatan persebaran tenaga Kesehatan
 - 5. Manajemen Kesehatan dan Informasi Kesehatan
 - 6. Peningkatan pengelolaan manajemen Kesehatan
 - 7. Pengembangan sistem informasi Kesehatan (SIK)
 - 8. Penelitian dan pengembangan Kesehatan

- d. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan farmasi
 - 1. Peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi
 - 2. Peningkatan ketersediaan obat generik
 - 3. Peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat
 - 4. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat
 - 5. Peningkatan pemakaian obat-obatan tradisional
- e. Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), seperti posyandu, polindes, Desa Siaga, Pos UKK (Upaya kesehatan Kerja), Toga (Taman Obat Keluarga)
 - 2. Peningkatan Peran serta organisasi-organisasi masyarakat, seperti LSM dalam upaya kesehatan masyarakat
 - 3. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

1.4 ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) target SDG's tahun WHO 2020 (AKI: 91,45/100.000 KH; AKB: 230/1.000 KH) dan Kabupaten Malaka tahun 2020 Kematian ibu ada 3 orang dan kematian bayi 15 orang (sumber data Profil Dinas Kesehatan). Jika dilihat dari potensi untuk trend AKB maka yang masih *on track* maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk terus menurunkan AKI dan AKB tersebut. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pustu di tiap Kelurahan, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga

kesehatan, kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDG's. Selain itu, terdapat beberapa penyakit seperti penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia cenderung meningkat kembali. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Akibat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.

Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terhambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada SKN dan Renstra Dinkes Kabupaten Malaka, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan system lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi pusat daerah di tingkat pimpinan. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan kesehatan kunjungan K6 yang sangat rendah	Belum optimal kunjungan ANC K6	Pemahaman masyarakat tentang manfaat ANC yang sangat kurang
2	Cakupan persalinan non faskes yang masih dibawah target	Masih ada persalinan dirumah yang ditolong oleh dukun	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran aktif masyarakat yang kurang ➤ Penerapan P4K belum maksimal
3	Kematian Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan penyebab kematian langsung	Masih ada Kematian Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan penyebab kematian langsung	Belum optimalnya dalam pelayanan kesehatan termasuk 3T (terlabat mengenal tanda bahaya dalam mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlabambat mendapat pertolongan difasilitas pelayanan kesehatan
4	Kematian Neonatal	Tingginya kematian pada neonatal umur 0-28hari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan tatalaksana Manajemen neonatal esensial yang belum sesuai Standar ➤ Kurang Pemahaman Masyarakat Tentang

			Deteksi Dini Faktor Resiko Pada Neonatal.
5	Cakupan ASI Eksklusif tidak mencapai target	Rendahnya Asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang pengetahuan ibu tentang manfaat asi eksklusif ➤ Ibu bekerja
6	Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	Rendahnya Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	Tidak tersedianya Reagen untuk pemeriksaan kusus pada lansia
7	Stunting	Tingginya Kasus Stunting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bumil KEK masih tinggi ➤ BBLR yang masih tinggi ➤ Asupan gizi pada 1000HPK ➤ Sanitasi lingkungan yang buruk ➤ PHBS
8	Cakupan Balita D/S yang rendah	Masih ada balita yang tidak datang posyandu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendahnya Partisipasi masyakat dalam posyandu ➤ H-1 Tidak berjalan

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

Permasalahan utama tersebut kemudian menghasilkan isu strategis pembangunan kesehatan di NTT yaitu: **“Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Malaka”** Dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal diperoleh issue- issue strategis sebagai berikut:

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Malaka dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas Kesehatan
3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata.
4. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal.
5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (*newemerging* dan *re- emerging*).
7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat.
8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapat penanganan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan. Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis sesuai dengan harapan dari visi pembangunan Kabupaten Malaka 2021-2026 “**Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta untuk meningkatkan capaian target pelayanan dan pembangunan pada Dinas Kesehatan maka perlu dirancang strategi dan arah kebijakannya.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing		
Misi 3	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Tangguh, Kompeten dan Berdaya Saing Global		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kompeten dan berdaya saing global yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia	Meningkatnya Akseibilitas dan kualitas layanan kesehatan	1. Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pemberian makanan tambahan (PMT) dan makanan pendamping ASI bagi ibu hamil KEK dan balita 2. Pemberian makanan tambahan dan suplemen serta tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri 3. Penanganan balita gizi buruk secara berkesinambungan 4. Dukungan dalam peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil lengkap dan kunjungan neonatal lengkap 5. Dukungan pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan 6. Dukungan dalam peningkatan kualitas Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M)

			<p>7. Dukungan dalam peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan persalinan oleh tenaga kesehatan</p> <p>8. Dukungan pelaksanaan pendampingan ibu dan anak pada 1.000 HPK oleh tenaga Kesehatan</p> <p>9. Dukungan pelaksanaan pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita.</p> <p>10. Dukungan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif</p> <p>11. Dukungan dalam penerapan pembinaan pola makan dalam keluarga</p> <p>12. Dukungan dalam pengembangan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p> <p>13. Dukungan penggerakan masyarakat hidup sehat melalui pendekatan keluarga dan lingkungan</p>
--	--	--	---

			<p>14. Dukungan peningkatan jumlah desa yang melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <p>15. Peningkatan pemahaman kesehatan di masyarakat</p> <p>16. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat</p>
		<p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas</p>	<p>1. Rekrutment tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PTT daerah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan terutama bagi bidan desa</p> <p>3. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada tenaga kesehatan bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan lainnya</p> <p>4. Percepatan pengurusan STR tenaga Kesehatan</p>

			<p>5. Dukungan untuk penempatan tenaga kesehatan sesuai proporsi dan kebutuhan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di Kabupaten/Kota</p> <p>6. Pemberian surat penugasan untuk pemenuhan dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat rujukan</p> <p>7. Fasilitasi organisasi profesi kesehatan sebagai mitra kerja di Wilayah Kabupaten Malaka</p> <p>8. Fasilitasi pembuatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di puskesmas untuk mendapatkan formasi tenaga tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan (Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan Lainnya)</p> <p>9. Fasilitasi tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan uji kompetensi naik jenjang jabatan fungsional</p>
--	--	--	---

			<p>10. Pelaksanaan penilaian angka kredit tenaga Kesehatan</p> <p>11. Pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat provinsi</p> <p>12. Pengawasan dan pembinaan serta pengendalian Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)</p>
		<p>3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>1. Pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan terapung.</p> <p>2. Penyediaan layanan <i>Flying Health Care</i></p> <p>3. Peningkatan fasilitas kesehatan di destinasi wisata</p> <p>4. Pemenuhan sarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar</p> <p>5. Dukungan untuk pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas Kesehatan</p> <p>6. Pemenuhan obat dan vaksin serta</p>

			<p>pengawasan, pengendalian obat, sediaan farmasi, produk pangan dan konsumsi</p> <p>7. Pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>8. Peningkatan pelayanan laboratorium Kesehatan</p> <p>9. Dukungan dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)</p>
		4. Mencegah dan mengendalikan Penyakit	<p>1. Dukungan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular</p> <p>2. Dukungan pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular</p> <p>3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa</p> <p>4. Dukungan dalam peningkatan kualitas dan cakupan imunisasi</p> <p>5. Peningkatan sistem kewaspadaan dini kejadian luar</p>

			<p>biasa/wabah/bencana</p> <p>6. Penanganan kejadian luar biasa/wabah/bencana</p> <p>7. Dukungan pelaksanaan Public Privat Mix untuk memperluas akses memutuskan Rantai Penularan penyakit</p> <p>8. Dukungan pembentukan jejaring pencegahan dan pengendalian penyakit lintas batas</p>
		<p>5. Meningkatkan kualitas manajemen kesehatan</p>	<p>1. Efisiensi penyelenggaraan kegiatan rutin dinas</p> <p>2. Pelaksanaan perencanaan dan terintegrasi</p> <p>3. Penyediaan data Kesehatan yang valid dan akurat</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dan terintegrasi</p> <p>5. Transparansi pengelolaan keuangan</p> <p>6. Penggunaan aplikasi pengurusan kepegawaian</p> <p>7. Dukungan untuk optimalisasi</p>

			penyerapan DAK kesehatan
Misi 6	Mewujudkan Ketangguhan Daerah terhadap Risiko Bencana dan Kejadian Luar Biasa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah serta memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebarannya dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dampak pemberlakuan protokol pencegahan penularannya	Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap Risiko Bencana dan Kejadian Luar Biasa	1. Meningkatkan Upaya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap Risiko Bencana dan Kejadian Luar Biasa	1. Sosialisasi dan Advokasi manajemen pencegahan dan penanganan kasus berpotensi wabah dan KLB 2. Peningkatan pemahaman kesehatan di masyarakat 3. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. 4. Meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Kejadian Luar Biasa 5. Meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan

			<p>protokol Kesehatan (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas)</p> <p>6. Meningkatkan pelayanan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat.</p>
--	--	--	--

2.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2023

Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator jangka menengah Dinas Kesehatan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menigkatkan Pelayanan kesehatan kunjungan ANC K6 pada Ibu Hamil	Ibu hamil	Menigkatkan kualitas Pelayanan kesehatan kunjungan ANC K6 pada Ibu Hamil	90
2	Meningkatkan Cakupan persalinan faskes	Ibu Bersalin	Meningkatkan Cakupan persalinan faskes	95
3	Menurunkan kasus Kematian Ibu hamil, bersalin dan Nifas	Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas	Menurunkan angka Kematian Ibu hamil, bersalin dan Nifas	4
4	Menurunkan Kasus Kematian Neonatal	Bayi	Menurunkan angka Kematian Neonatal	0

5	Menigkatkan Cakupan ASI Eksklusif	Ibu Menyusui	Menigkatkan Cakupan ASI Eksklusif	80
6	Meningkatkan Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	Lansia	Meningkatkan Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	90
7	Menurunkan presentase balita Stunting	Bayi dan Balita	Menurunkan presentase balita Stunting	18,8
8	Meningkatakan Cakupan Balita D/S	Bayi dan Balita	Meningkatakan Cakupan Balita D/S	100
9	Desa melaksanakan STBM	Desa	Pengembangan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75
10	Sarana Air Minum memenuhi syarat	Sarana Air Minum	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air	75
11	TPM Memenuhi syarat	TPM	Pengawasan Tempat pengolahan Makanan	75
12	TTU memenuhi syarat	TTU	Pengawasan Tempat-Tempat Umum	75
13	Meningkatnya pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan	Fasyankes	pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan	75
14	Terlaksananya kesehatankerja di puskesmas	Puskesmas	1. Sosialisasi Orientasi Kesehatan Kerja.	75
15	Terlaksananua K3 di tk puskesmas	Puskesmas	2. Sosialisasi K3 Internal Puskesmas dan membentuk Tim Pelaksana K3 di Tingkat Puskesmas.	75
16	Terlaksananya kesehatankerja di puskesmas	Puskesmas	3. Melaksanakan Pemeriksaan tempat Kerja dan Pekerja.	75
17	Terbentuknya Pos UKK	Pos UKK	4. Pembentukan Pos UKK	75
18	Terlaksananya kegiatan di pos UKK	Kader Pos UKK	5. Pelatihan Kader Pos UKK.	75
19	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Masyarakat	Penanganan penderita hipertensi yang	100%

			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
20	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Masyara kat	Penanganan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
21	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Masyara kat	Penanganan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
22	Meningkatkan angka penemuan kasus TB	masyara kat	Penanganan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
23	Meningkatkan angka penemuan kasus HIV	masyara kat	Penanganan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<1%
24	Eliminasi Malaria	masyara kat	Terlaksananya Pengendalian vector, Penemuan dan pengobatan Malaria	<1%
25	Penanggulangan Penyakit Diare	masyara kat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Diare	100%
26	Penanggulangan Penyakit DBD	masyara kat	Terlaksananya Penemuan Dan Penanganan Kasus Demam Berdarah	100%
27	Penanggulangan ISPA	masyara kat	Terlaksananya Pelacakan Kasus Pneumonia	100%
28	Eradikasi Frambusia	masyara kat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Frambusia	<1%
29	Eliminasi kusta	masyara kat	Terlaksananya penemuan dan pengobatan Penderita Kusta	100%
30	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskes mas & Dinas	Pelatihan deteksi dini kanker payudara dengan metode SADANIS dan kanker leher rahim dengan metode IVA bagi	20 org

			dokter dan bidan Tingkat Kabupaten Malaka	
31	Meningkatkan Pengetahuan dan menyebarkan informasi	Masyarakat	Pegadaan KIE Posbindu PTM (Leaflet, brosur, banner, Buku Saku PTM)	Leaflet 2000 Lembar, Brosur 2000 lembar, Banner 100 buah, Buku Saku PTM 200 buku
32	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas & Dinas	Refresing bagi pengelola program PTMse-kabupaten malaka	20 org
33	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas	Monev Program PTM bagi pengelola puskesmas	20 kali
34	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas	Pengadaan Kit Posbindu bagi puskesmas	10 kit
35	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Nakes	10 org
36	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas & Dinas	Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di	20 org
37	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas & Lintas Sektor	Supervise penerapan KTR di Kabupaten Malaka	20 kali
38	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas puskesmas & masyarakat	Sosialisasi dan Advokasi Manajemen pencegahan dan penanganan masalah Keswa anak dan remaja bagi pengelola program	20 org
39	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan petugas	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	20 org dokter, 20 org perawat

40	Menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat KLB/wabah	Masyarakat	Program survailens, sub kegiatan: kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus berpotensi KLB	100%
41	Mendukung program eradikasi kasus PD3I	Masyarakat	Program: survailens Kegiatan: pengrimana spesimen kasus suspek akibat PD3I	100%
42	Mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit PD3I	Masyarakat	Program Imunisasi (semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap)	95%
43	Meningkatkan UHH	Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas	20
			Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000	100
			Persentase Puskesmas Terakreditasi	100
			Persentase RS terakreditasi	100
			Jumlah Desa yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	127
			Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dari sama dengan 2%	100
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	90

			Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80
			Persentasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	10
			Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	1
			Jumlah griya sehat di kabupaten	1

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dirumuskan rencana kerja tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sebagai berikut: Peraturan menteri kesehatan No 4 Tahun 2020

Tabel.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4
1	Ibu hamil	Menigkatkan kualitas Pelayanan kesehatan kunjungan ANC K6 pada Ibu Hamil	90

2	Ibu Bersalin	Meningkatkan Cakupan persalinan faskes	95
3	Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas	Menurunkan angka Kematian Ibu hamil, bersalin dan Nifas	4
4	Bayi	Menurunkan angka Kematian Neonatal	0
5	Ibu Menyusui	Menigkatkan Cakupan ASI Eksklusif	80
6	Lansia	Meningkatkan Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	90
7	Bayi dan Balita	Menurunkan presentase balita Stunting	18,8
8	Bayi dan Balita	Meningkatakan Cakupan Balita D/S	100
9	Desa	Pengembangan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75
10	Sarana Air Minum	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air	75
11	TPM	Pengawasan Tempat pengolahan Makanan	75

12	TTU	Pengawasan Tempat- Tempat Umum	75
13	Fasyankes	pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan	75
14	Puskesmas	1. Sosialisasi Orientasi Kesehatan Kerja.	75
15	puskesmas	2. Sosialisasi K3 Internal Puskesmas dan membentuk Tim Pelaksana K3 di Tingkat Puskesmas.	75
16	Puskesmas	3. Melaksanakan Pemeriksaan tempat Kerja dan Pekerja.	75
17	Pos UKK	4. Pembentukan Pos UKK	75
18	Kader Pos UKK	5. Pelatihan Kader Pos UKK.	75
19	masyarakat	Penanganan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
20	masyarakat	Penanganan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
21	masyarakat	Penanganan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
22	masyarakat	Penanganan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
23	masyarakat	Penanganan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<1%
24	masyarakat	Terlaksananya Pengendalian vector, Penemuan dan pengobatan Malaria	<1%

25	masyarakat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Diare	100%
26	masyarakat	Terlaksananya Penemuan Dan Penanganan Kasus Demam Berdarah	100%
27	masyarakat	Terlaksananya Pelacakan Kasus Pneumonia	100%
28	masyarakat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Frambusia	<1%
29	masyarakat	Terlaksananya penemuan dan pengobatan Penderita Kusta	100%
30	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan deteksi dini kanker payudara dengan metode SADANIS dan kanker leher rahim dengan metode IVA bagi dokter dan bidan Tingkat Kabupaten Malaka	20 org
31	Masyarakat	Pegadaan KIE Posbindu PTM (Leaflet, brosur, banner, Buku Saku PTM)	Leaflet 2000 Lem bar, Brosur 2000 lembar, Bann 0er 100 buah, Buku Saku PTM 200 buku
32	Petugas Puskesmas & Dinas	Refresing bagi pengelola program PTMsc-kabupaten malaka	20 org
33	Petugas Puskesmas	Monev Program PTM bagi pengelola puskesmas	20 kali
34	Puskesmas	Pengadaan Kit Posbindu bagi puskesmas	10 kit
35	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Nakes	20 org
36	Petugas Puskesmas & Dinas	Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di	10 org
37	Petugas Puskesmas & Lintas Sektor	Supervise penerapan KTR di Kabupaten Malaka	20 kali

38	Petugas puskesmas & masyarakat	Sosialisasi dan Advokasi Manajemen pencegahan dan penanganan masalah Keswa anak dan remaja bagi pengelola program	20 org
39	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	20 org dokter, 20 org perawat
40	Masyarakat	Program survailens, sub kegiatan: kegiatan penyelidikan epidemiolgi kasus berpotensi KLB	100%
41	Masyarakat	Program: survailens	100%
		Kegiatan: pengrimana spesimen kasus suspek akibat PD3I	
42	Masyarakat	Program Imunisasi (semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap)	95%

Tabel.2 SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Jmlh Sasaran(per jiwa / orang)	Target 2023
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	4.300	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.486	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.118	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	1559	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	37.265	100%
6	Pendidikan pada usia produktif	114.187	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	21.484	100%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	3.689	100%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	1.002	100%

10	Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	162	100%
11	Pelayanan kesehatan pada orang dengan TB	3.847	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	5271	100%

2.1.3 PROGRAM

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan berdasarkan DPPA SKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 173.551.465.558

Adapun Rincian target dan realisasi belanjanya yaitu:

Target belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 97.495.699.290,- dan Realisasi belanja Operasi Tahun 2023 sebesar 95,71% yaitu Rp. 93.312.037.198,-

Target belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 76.055.766.268,- dan Realisasi belanja modal adalah 84,81% yaitu Rp. 64.503.697.008,-

- 1. Total Alokasi Anggaran Belanja
- 2. Belanja Langsung : Rp.173.551.465.558,- Terealisasi Rp. 157.815.734.206,-
- 3. Belanja tidak Langsung : Rp. - Terealisasi Rp. –

2.1.4 Perjanjian Kinerja

- a. Perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 dan format Perjanjian Kinerja 2024 terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaiannya target masing-masing kegiatan dan sasaran.

Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di tetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023. Selain itu pengukuran capaian kinerja juga dilihat dari cakupan SPM bidang kesehatan.

Tabel.3 Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Ibu hamil	Menigkatkan kualitas Pelayanan kesehatan kunjungan ANC K6 pada Ibu Hamil	90	72%
2	Ibu Bersalin	Meningkatkan Cakupan persalinan faskes	95	85%
3	Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas	Menurunkan angka Kematian Ibu hamil, bersalin dan Nifas	4	5
4	Bayi	Menurunkan angka Kematian Neonatal	0	19

5	Ibu Menyusui	Menigkatkan Cakupan ASI Eksklusif	55	75,4%
6	Lansia	Meningkatkan Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia	90	83,92%
7	Bayi dan Balita	Menurunkan presentase balita Stunting	18,8	15,5
8	Bayi dan Balita	Meningkatakan Cakupan Balita D/S	100	88,8%
9	Desa	Pengembangan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75	29,13%
10	Sarana Air Minum	Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air	75	34,6%
11	TPM	Pengawasan Tempat pengolahan Makanan	75	33,7%
12	TTU	Pengawasan Tempat- Tempat Umum	75	76,9%
13	Fasyankes	pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan	75	14,29%
14	Puskesmas	1. Sosialisasi Orientasi Kesehatan Kerja.	75	0
15	Puskesmas	2. Sosialisasi K3 Internal Puskesmas dan membentuk Tim Pelaksana K3 di Tingkat Puskesmas.	75	0
16	Puskesmas	3. Melaksanakan Pemeriksaan tempat Kerja dan Pekerja.	75	0
17	Pos UKK	4. Pembentukan Pos UKK	75	23%
18	Kader Pos UKK	5. Pelatihan Kader Pos UKK.	75	69%

19	Masyarakat	Penanganan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	73,50%
20	Masyarakat	Penanganan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	75,15%
21	Masyarakat	Penanganan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
22	Masyarakat	Penanganan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	82%
23	Masyarakat	Penanganan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<1%	0,17
24	Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian vector, Penemuan dan pengobatan Malaria	<1%	0,58%
25	Masyarakat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Diare	100%	-
26	Masyarakat	Terlaksananya Penemuan Dan Penanganan Kasus Demam Berdarah	100%	100%
27	Masyarakat	Terlaksananya Pelacakan Kasus Pneumonia	100%	100%
28	Masyarakat	Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Frambusia	100%	100%
29	Masyarakat	Terlaksananya penemuan dan pengobatan Penderita Kusta	<1%	0,9
30	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan deteksi dini kanker payudara dengan metode SADANIS dan kanker leher rahim dengan metode IVA bagi dokter dan bidan Tingkat Kabupaten Malaka	20 org	10 orang

31	Masyarakat	Pegadaan KIE Posbindu PTM (Leaflet, brosur, banner, Buku Saku PTM)	Leaflet 2000 Lem bar, Brosur 2000 lembar, Banner 100 buah, Buku Saku PTM 200 buku	0 (tidak ada)
32	Petugas Puskesmas & Dinas	Refresing bagi pengelola program PTMse-kabupaten malaka	20 org	20 orang
33	Petugas Puskesmas	Monev Program PTM bagi pengelola puskesmas	20 kali	20 kali
34	Puskesmas	Pengadaan Kit Posbindu bagi puskesmas	10 kit	10 kit
35	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Nakes	10 org	20 orang
36	Petugas Puskesmas & Dinas	Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di	20 org	20 org
37	Petugas Puskesmas & Lintas Sektor	Supervise penerapan KTR di Kabupaten Malaka	20 kali	20 kali
38	Petugas puskesmas & masyarakat	Sosialisasi dan Advokasi Manajemen pencegahan dan penanganan masalah Keswa anak dan remaja bagi pengelola program	20 org	20 org
39	Petugas Puskesmas & Dinas	Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	20 org dokter, 20 org perawat	8 Orang
40	Masyarakat	Program survailens, sub kegiatan: kegiatan penyelidikan epidemiolgi kasus berpotensi KLB	100%	100%
41	Masyarakat	Program: survailens Kegiatan: pengrimana spesimen kasus suspek akibat PD3I	100%	83%
42	Masyarakat	Program Imunisasi (semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap)-belum	95%	72,25 %

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam Indikator kinerja bidang kesehatan terdapat 42 indikator tujuan strategis dan 12 indikator. Capaian untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan kunjungan ANC K6 pada Ibu Hamil
Realisasi dibawah target karena Jumlah K1 Akses yang Tinggi, Kerja sama Linsek tidak berjalan dengan baik, banyak ibu hamil diluar sasaran yang datang untuk bersalin, untuk tingkatan kerja sama dengan linsek untuk menjaring Ibu Hamil,
- 2) Meningkatkan Cakupan persalinan faskes pada ibu bersalin
Realisasi dibawah target karena Masih ada persalinan di non Fasyankes (klinik) dan masih ada juga persalinan di rumah, Perkuat pemantauan Ibu Hamil melalui 2h2 Center, Pendampingan atau Mapping Sasaran dan kerja sama linsek sebagai jejaring wilayah kerja puskesmas
- 3) Menurunkan angka Kematian Ibu hamil, bersalin dan Nifas
Realisasi lebih tinggi daripada target
- 4) Menurunkan angka Kematian Neonatal pada bayi
Realisasi lebih tinggi daripada target
- 5) Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif pada ibu menyusui
Realisasi lebih tinggi daripada target
- 6) Meningkatkan Deteksi dini Penyakit menular dan tidak menular pada lansia
Realisasi lebih rendah daripada target karena Masih kurangnya sarana prasarana (kit Lansia), Belum Semua Lansia umur 60 > mendapatkan screening P3G, solusinya adalah perlu pengadaan Kit Lansia, Perlu melakukan kunjungan rumah.
- 7) Menurunkan presentase balita Stunting
realisasi lebih rendah daripada target

- 8) Meningkatkan Cakupan Balita D/S
Realisasi lebih rendah daripada target karena kurangnya peran linsek dalam memobilisasi masyarakat untuk mengikuti Posyandu, masih adanya orang tua yang menolak untuk mengantar anaknya ke posyandu, solusinya adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan linsek
- 9) Pengembangan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Realisasi lebih rendah daripada target
- 10) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air
Realisasi lebih rendah daripada target karena sanitarian kit yang tersedia di puskesmas dalam keadaan rusak, solusinya adalah melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat yang sanitarian kitnya masih baik
- 11) Pengawasan Tempat pengolahan Makanan
Realisasi lebih rendah daripada target karena alat pemeriksaan makanan hanya ada di dinas dan tenaga belum semua paham cara pemeriksaan, solusinya adalah mengadakan alat dan dilakukan bimtek
- 12) Pengawasan Tempat- Tempat Umum
Realisasi lebih tinggi daripada target
- 13) Pengelolaan Limbah medis di sarana pelayanan
realisasi lebih rendah daripada target karena belum tersedia IPAL di seluruh puskesmas, IPAL yang tersedia dalam keadaan rusak, tenaga belumpaham pengoperasian IPAL, solusinya adalah Pengadaan IPAL, Perbaikan IPAL dan bimtek IPAL
- 14) Sosialisasi Orientasi Kesehatan Kerja pada puskesmas
Realisasi lebih rendah daripada target
- 15) Sosialisasi K3 Internal Puskesmas dan membentuk Tim Pelaksana K3 di Tingkat Puskesmas.
Realisasi lebih rendah daripada target

- 16) Melaksanakan Pemeriksaan tempat Kerja dan Pekerja
Realisasi lebih rendah daripada target karena adanya pergantian pengelola UKK, solusinya adalah Bimtek pengelola UKK baru
- 17) Pembentukan Pos UKK pada pos UKK
Realisasi lebih rendah daripada target karena belum ada alokasi dana terkait pembentukan pos UKK, solusi adalah usulan dana terkait pembentukan POS UKK
- 18) Pelatihan Kader Pos UKK
Realisasi lebih rendah daripada target karena belum ada alokasi dana terkait pembentukan pos UKK, solusi adalah usulan dana terkait pembentukan POS UKK
- 19) Penanganan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat
Realisasi lebih rendah dari pada target karena belum semua penderita hipertensi melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan
- 20) Penanganan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat
Realisasi lebih rendah dari pada target belum semua penderita diabetes melitus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan
- 21) Penanganan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada masyarakat
Realisasi mencapai target
- 22) Penanganan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada masyarakat
Realisasi lebih rendah daripada target karena masih kurang aktifnya petugas dalam melakukan pelacakan dan penjarangan kasus TB ke desa-desa yang sangat terpencil, kurangnya kerjasama petugas dan kader TB di desa dalam melakukan investigasi kontak ke semua pasien tb yang diobati, masih kurangnya kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat dijadikan sebagai trik dalam meningkatkan penemuan TBC

- 23) Penanganan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada masyarakat
Realisasi mencapai target
- 24) Terlaksananya Pengendalian vector, Penemuan dan pengobatan Malaria pada masyarakat
Realisasi mencapai target
- 25) Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Diare pada masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 26) Terlaksananya Penemuan Dan Penanganan Kasus Demam Berdarah pada masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 27) Terlaksananya Pelacakan Kasus Pneumonia pada masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 28) Terpenuhinya Yankes Terhadap Penderita Frambusia pada masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 29) Terlaksananya penemuan dan pengobatan Penderita Kusta pada masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 30) Pelatihan deteksi dini kanker payudara dengan metode SADANIS dan kanker leher rahim dengan metode IVA bagi dokter dan bidan Tingkat Kabupaten Malaka pada petugas puskesmas dan dinas
Realisasi lebih rendah daripada target karena keterbatasan anggaran untuk pelatihan iva dan sadanis tingkat kabupaten tahun 2023
- 31) Pegadaan KIE Posbindu PTM (Leaflet, brosur, banner, Buku Saku PTM) pada masyarakat
Realisasi lebih rendah target
- 32) Refresing bagi pengelola program PTMse-kabupaten malaka puskesmas dan dinas
Realisasi sesuai target

- 33) Monev Program PTM bagi pengelola puskesmas
Realisasi sesuai target
- 34) Pengadaan Kit Posbindu bagi puskesmas dan dinas
Realisasi sesuai target
- 35) Pelatihan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Nakes puskesmas dan dinas
Realisasi sesuai target
- 36) Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di puskesmas dan dinas
- 37) Supervise penerapan KTR di Kabupaten Malaka bagi petugas puskesmas dan lintas sector
Realisasi sesuai target
- 38) Sosialisasi dan Advokasi Manajemen pencegahan dan penanganan masalah Keswa anak dan remaja bagi pengelola program bagi petugas puskesmas dan masyarakat
Realisasi sesuai target
- 39) Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas bagi petugas puskesmas dan dinas
Realisasi lebih rendah daripada target karena tidak adanya anggaran
- 40) Program survailens, sub kegiatan: kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus berpotensi KLB bagi masyarakat
Realisasi sesuai dengan target
- 41) Pengiriman spesimen kasus suspek akibat PD3I bagi masyarakat
Realisasi lebih rendah daripada target karena belum ada kasus yang harus dilakukan pemeriksaan sampel
- 42) Program Imunisasi (semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap) bagi masyarakat
Realisasi lebih rendah daripada target laporan secara online, sinyal internet kurang stabil, pergantian pengelola imunisasi, keterlambatan kedatangan vaksin

Tabel. 4 Capaian SPM bidang kesehatan kabupaten Malaka Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Pencapaian Pelayanan Dasar 2023	Pencapaian Pelayanan Dasar 2023
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	100%	86,43
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	84,93
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	84
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	83,11
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	62,16
6	Pendidikan pada usia produktif	100%	29,53
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	83,92
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	73,50%	77,62
9	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	75,15%	75,25
10	Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100%	85,19
11	Pelayanan kesehatan pada orang dengan TB	82%	44,89

12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	96%	76,08
----	--	-----	-------

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No 4 Tahun 2019:

- Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu hamil, jumlah sasaran 4300 tahun 2023 dan target sebanyak 90% sedangkan realisasi jumlah sasaran 3087 dan capaiannya 71,8% hal ini karena Jumlah K1 Akses yang Tinggi, Kerja sama Linsek tidak berjalan dengan baik.
- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan, dokter dan dokter spesialis kebidanan yang bekerja difasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi disuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Target tahun 2023 sebanyak 95% dan capaiannya 84,94% belum mancapai target hal ini di sebabkan masih ada persalinan non faskes dan ditolong oleh dukun.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan neonatal merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, Target pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 sebanyak 93% dan capaiannya 84%, Hal ini disebabkan Masih adanya kematian Neonatal 0-28 Hari Sebanyak 19 orang dan lahir mati sebanyak 30 orang, sehingga tidak dapat dilakukan kunjungan lengkap.
- Cakupan pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Target tahun 2023 sebanyak 80% dan capaiannya sebanyak 83,09%, Hal ini menunjukkan kinerja

petugas kesehatan semakin baik dalam memberikan pelayanan kesehatan pada balita baik di posyandu maupun di fasilitas kesehatan lainnya namun belum mencapai target, dikarenakan belum semua puskesmas melaksanakan MTBS dan Kelas Ibu Balita, Pergantian pengelola program

5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS/Dokter Kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 62,16% dari target 80%.

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2023 mencapai 29,53% dari target 80% capaian masih dibawah target. Disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kedepan perlu adanya penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan secara teratur.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Lansia) pada tahun 2023 terdiri dari pelaksanaan posyandu Lansia. Adapun pelayanan yang diberikan dalam posyandu Lansia adalah: pemeriksaan dan pengobatan lansia, Penyuluhan kepada Lansia, Konseling dan Rujukan ke Puskesmas apabila ditemukan kelainan. Target pelayanan kesehatan lansia tahun 2023 sebanyak 83,92% dan capaiannya 29,53%. Hal tersebut disebabkan pengelola Program Sering diganti (1 Tahun sampai 3 kali Ganti, Masih kurangnya sarana prasarana (kit Lansia), Belum Semua Lansia umur 60 > mendapatkan screening P3G

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Sasaran pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah usia 15-59 tahun. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan

pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder diwilayah kerjanya. Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi pada tahun 2023 mencapai 73,5% dari target 100%, sehingga belum mencapai target. Hal ini disebabkan belum semua penderita hipertensi melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus pada tahun 2023 mencapai 75,15% dari target 100%, sehingga belum mencapai target hal ini disebabkan belum semua penderita diabetes melitus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan.

10. Cakupan Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Cakupan upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa mencapai 100% dari target 100%.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan TB

Pelayanan tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB tahun ini sebanyak 82% dari target 100%. Hal ini belum mencapai target karena masih kurang aktifnya petugas dalam melakukan pelacakan dan penjangkaran kasus TB ke desa-desa yang sangat terpencil, kurangnya kerjasama Petugas dan Kader TB di desa dalam melakukan investigasi kontak ke semua pasien TB yang diobati, masih kurangnya kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat dijadikan sebagai trik dalam meningkatkan Penemuan TBC.

12. Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV

Cakupan pelayanan pada orang yang terinfeksi HIV sebesar 96% dari target 100%. Hal ini disebabkan belum semua populasi kunci / sasaran yang harus diskriminasi diperiksa, petugas kurang aktif dalam melaksanakan penjangkaran ke desa-desa

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

➤ Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka pada Tahun 2023 sebesar Rp.251.622.300,- dan realisasi pendapatan Tahun 2023 adalah 94,55% yaitu Rp. 237.917.800,- yang diperoleh dari hasil retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan dana kapitasi jkn pada FKTP 20 puskesmas.

➤ Realisasi Belanja

Total alokasi anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Tahun 2023 Rp. 173.551.465.558,- dan Realisasinya sebesar 90,93% yaitu Rp. 157.815.734.206,-

Adapun Rincian target dan realisasi belanjanya yaitu:

- Target belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 97.495.699.290,- dan Realisasi belanja Operasi Tahun 2023 sebesar 95,71% yaitu Rp. 93.312.037.198,-
- Target belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar 76.055.766.268,-
Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar 84,81% yaitu Rp. 64.503.697.008,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sasaran utama agar kinerja pemerintah lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab untuk menjalankan visi, misi demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dalam upaya mencapai visi telah menetapkan 3 (tiga) Misi dalam 14 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, serta pencapaian SPM bidang kesehatan yang merupakan indikator kinerja utama sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka belum sempurna, maka sangat diharapkan koreksi dan masukan guna perbaikan penyusunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan untuk maklum dan urusan lebih lanjut.